

**“ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN PPD/K TERHADAP *MINDSET*
DAN *LIVELIHOOD* PEMANFAAT DANA UEK-SP DI KELURAHAN
UMBANSARI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU”**

Oleh:

Monang P. Tampubolon, Syaiful Hadi, Ahmad Rifai
tampubolonmonang@gmail.com. Hp:081223026268

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of UEK-SP effort for user mindset and livelihood. The research sample was taken from 57 respondent by using proportional random sampling method. They are 10% of 568 user in 2005 until 2010. The tool analysis method that used in this research is vector analysis with VPA (Vektor Project Analysis). The result of research show us the increasing mindset and livelihood for respondent as user of Umbansari UEK-SP fund. The increasing of mindset is 1.75 from 5.09 to be 6.84 with an year average increasing about 0.35. The biggest factor that had an effect on increasing of mindset aspect is the level of confidence, saving habit, information resources and knowledge. The result of this research found the increasing of livelihood is 0.51 from 5.03 to be 5.54 with an year average increasing about 0.10. The biggest factor that had an effect on increasing of livelihood aspect is income and vocation. The user of UEK-SP mindset and livehood position before receive fund monetary from UEK-SP Umbansari have been in average which there in good category and after received the monetary fund was increasing better than before. Respondent was able to expand the business which have done, either the first business or the last business. Respondent have done business development through fund monetary assistance which taken from UEK-SP Umbansari.

Keywords: monetary, mindset, livelihood.

PENDAHULUAN

Indonesia negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat, berakibat pada rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Indonesia sebagai negara sedang berkembang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth oriented strategy*) yang belum mampu mengadakan pemerataan pendapatan, mengatasi ketimpangan pendapatan, serta mengurangi kemiskinan. Pendekatan kebutuhan pokok (*basic human needs approach*) adalah kebutuhan yang penting untuk kelangsungan hidup, yang terdiri atas kebutuhan konsumsi dan kebutuhan layanan sosial seperti air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan (Hill, 2002).

Tingkat perekonomian masyarakat saat ini sangat diperlukan adanya Lembaga Perkreditan yang dapat memenuhi dan melayani kebutuhan permodalan masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan tingkat kemajuan masyarakat pada umumnya. Peran penting Lembaga Perkreditan Rakyat sebagai salah satu perintis untuk memberdayakan masyarakat kecil dan mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya berupa program-program penanggulangan kemiskinan, diantaranya 1) pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Desa Tertinggal, 2) pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia berkaitan dengan perbaikan aspek lingkungan, pemukiman, perumahan, dan prasarana pendukungnya seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), 3) pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek usaha, lapangan, seperti pembentukan Lembaga Keuangan Mikro yaitu Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) serta kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). (Bappeda Pekanbaru, 2008).

Riau merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dengan majunya sektor pertambangan, pertanian, perikanan, industri dan sebagainya. Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ketakberdayaan penduduk miskin, disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin ke luar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, masih terdapat penduduk miskin. Jumlah fakir miskin di Pekanbaru pada tahun 2008 sebesar 17.546 jiwa dari jumlah penduduk Pekanbaru 799.213 jiwa (2,13 %) dari total penduduk pekanbaru (BPS Riau, Pekanbaru Dalam Angka 2009).

Program UED/K-SP merupakan lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat kelurahan yang diusahakan dan dikelola masyarakat, dimana sasaran dari program ini adalah masyarakat kurang mampu. Dana usaha desa lebih diarahkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang tergolong ke dalam usaha kecil dan menengah (BPPM Riau, 2006).

Program UED/K-SP ini bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat, meningkatkan kreatifitas berusaha anggota masyarakat berpenghasilan rendah, menghindarkan masyarakat dari pengaruh pelepas uang (rentenir) dengan bunga tinggi, meningkatkan peranan masyarakat dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah, memelihara dan meningkatkan adat istiadat bergotong royong, gemar menabung secara tertib dan teratur serta berkelanjutan (BPPM Riau, 2006).

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Pengambilan lokasi sebagai tempat penelitian dengan

pertimbangan sebagai salah satu program UEK-SP pertama di kota Pekanbaru yang telah dijalankan sejak tahun 2005 dan kelurahan tersebut merupakan daerah berkembang. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan yang dimulai dari Februari 2012 hingga Juni 2012. Tahapan-tahapan penelitian ini terdiri dari pembuatan proposal, pengumpulan data, pengolahan data serta penulisan laporan akhir.

Metode Pengambilan Sampel dan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK SP) dari berbagai jenis usaha (perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri kecil dan jasa). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 568 orang. Dimana pada tahap pertama metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah *proporsional random sampling*, yakni sampel dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya (perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, industri kecil, dan jasa).

Jumlah pemanfaat dana UEK-SP dari tahun 2005-2008 berjumlah 568 orang. Dari total populasi tersebut diambil sampel sebanyak 10% dari jumlah populasi masing-masing jenis pekerjaan untuk menjelaskan kondisi keragaman usaha masyarakat Kelurahan Umbansari. Jumlah sampel keseluruhan didapat sebanyak 57 orang. Adapun jenis pekerjaan, jumlah populasi (pemanfaat) dan jumlah sampel dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Teknik Pengambilan Sampel

No	Jenis Pekerjaan				
	Tahun	Perdagangan	Pertanian	Industri kecil	jasa
1	2006	71	33	6	21
2	2007	71	33	6	21
3	2008	168	63	16	59
	Jumlah	310	129	28	101
	Total Populasi		568		
	Jumlah	31	13	3	10
	Total Sampel		57		

Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode survey melalui wawancara terstruktur kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa.

Data primer terdiri dari identitas responden, pekerjaan, besarnya dana yang diterima, pendapatan sebelum dan setelah menerima bantuan program UEK-SP. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga seperti Pengelola UEK-SP, Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, dan instansi atau lembaga lain yang mendukung ketersediaan data untuk penelitian ini.

Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan *Vektor Project Analysis* (VPA). Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian diolah dengan membuat rata-rata skor dari setiap individu responden menjadi rata-rata skor dari setiap individu responden. Peningkatan *mindset* dan *livelihood* masing-masing responden dihitung dengan perkalian dari skor sebelum maupun sesudah dengan besaran bobot dari tiap indikator lalu skor terbobot sesudah dikurangi dengan skor terbobot sebelum baik dari *mindset* maupun *livelihood*. Adapun indikator kesejahteraan yang akan dibuat kedalam rata-rata tersebut adalah meliputi indikator dalam bidang Pola pikir (*Mindset*) dan Kualitas Hidup (*livelihood*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/ Kelurahan (PPD/K)

1. Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD/K)

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan dimaksud diberi nama Dana Usaha Desa/Kelurahan. Pemanfaatan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program pembangunan yang sarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat. Karena itu dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan.

Program Pemberdayaan Desa adalah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), serta dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004.

Dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) upaya memperkuat penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akses modal. Sebab bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, beberapa sumber kemajuan ekonomi diatas masih merupakan barang langka dan merupakan kendala utama bagi keberdayaan mereka. Kecilnya modal,

rendahnya penguasaan teknologi, sempitnya peluang dan kesempatan kerja, terbatasnya pengembangan sumber daya manusia dan tidak dikuasainya akses pasar, sering menjadi penyebab utama ketergantungan dan ketertinggalan masyarakat lapisan bawah. Padahal berbagai faktor tersebut merupakan prasyarat keberdayaan yang mutlak diperlukan.

2. Tujuan Program

Tujuan Program Pemberdayaan Desa ialah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa.

Program Pemberdayaan Desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Riau, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

- a. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi
- b. Produktif dalam bentuk :
 - Penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin,
 - Penciptaan lapangan kerja,
 - Penyediaan bantuan permodalan yang berpihak kepada masyarakat miskin.
 - Penguatan peran aparat pemerintah desa/kelurahan.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk
 - Penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan,
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa/kelurahan,
 - Pembangunan desa/kelurahan secara terencana dan berkelanjutan,
 - Penguatan kapasitas kelompok dan anggota usaha kecil dan menengah.

3. Sasaran Program

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah:

- a. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan/kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infra struktur desa/kelurahan melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah (*Bottom Up*) yang diimplementasikan oleh seluruh Dinas Instansi Sektorial baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- c. Melembagakan sistem perencanaan partisipatif di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui peran aktif Dinas dan Sektorial.

4. Pengelolaan Program

Kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I).

Kegiatan perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) bidang sektorial adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang berdasarkan sistem partisipatif berdasarkan kebutuhan aktual

desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya desa/kelurahan.

Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar PPD yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan serta penyaluran dana.

Seluruh hasil kegiatan PPD yang telah dilaksanakan oleh masyarakat wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Kegiatan bidang sektoral yang dilaksanakan oleh dinas-dinas, seperti bidang ekonomi, simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan serta kegiatan lainnya harus memiliki rencana yang dapat menjamin pelestarian kegiatan tersebut. Segala keputusan yang menyangkut pengembangan atau pelestarian kegiatan harus disepakati dalam Musyawarah Desa/Kelurahan.

Keberlanjutan dan pelestarian PPD merupakan isu strategis. Konsep keberlanjutan lebih didasari oleh pengertian tentang keharusan berlanjutnya seluruh aspek kegiatan sistem dan mekanisme PPD yang telah dan sedang berlangsung di masyarakat. Sedangkan konsep pelestarian lebih didasari oleh pengertian tentang keharusan terinternalisasikannya nilai-nilai luhur, norma-norma, etika, visi dan misi, tujuan, prinsip-prinsip dan sebagainya pada sikap masyarakat dan aparat serta semua pelaku pembangunan baik secara individu maupun kelompok.

Dalam rangka keberlanjutan dan pelestarian program, Pemerintah Daerah harus segera mengambil peran aktif dan proaktif dalam batas koridor hak dan wewenang sebagai pelindung, pembina dan pengendali serta memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan dirinya sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berperan untuk :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).
- c. Memberikan perlindungan secara jelas dan tegas kepada golongan masyarakat yang lemah melalui peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat.

Kebijakan keberlanjutan dan pelestarian PPD paling tidak menyangkut dua aspek, yaitu apa yang harus dilanjutkan dan apa yang harus dilestarikan. Keberlanjutan dan pelestarian PPD bukanlah sekedar mengembangkan Dana Usaha Desa/Kelurahan ataupun kegiatan pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Lembaga UED/K-SP saja. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana bisa melanjutkan dan melestarikan sistem dan kelembagaan PPD yang sudah terbangun dimasyarakat selama ini.

Ada dua hal yang menentukan akan menjamin keberhasilan program keberlanjutan dan pelestarian PPD. Pertama adanya rasa memiliki Pemerintah Daerah terhadap program. Kedua, penerimaan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan kewajiban membina, mengawasi/mengendalikan dan melindungi program ini sepenuh hati. Dengan adanya rasa memiliki diharapkan muncul rasa syukur dan bangga atas adanya program PPD dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya akan mendorong semangat dan motivasi untuk selalu dekat dengan kegiatan itu dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik (munculnya ide-

ide yang kreatif) demi keberlanjutan dan pelestarian PPD. Dengan adanya sikap penerimaan Pemerintah Daerah terhadap program ini, diharapkan Pemerintah Daerah akan lebih bertanggung jawab dan bersedia berkorban moril maupun materil untuk menjamin keberlanjutan dan pelestarian program.

Peningkatan Rata-rata *Mindset*

Berdasarkan Tabel 2 di bawah dapat dilihat terjadi peningkatan *mindset* responden Kelurahan Umbansari. Pertumbuhan sub indikator *mindset* terbesar yang sangat mempengaruhi percepatan pertumbuhan kesejahteraan dari tabel di atas terlihat pada sub indikator tingkat kepercayaan diri sebesar 53,6%, responden menyadari pentingnya menghadiri pertemuan-pertemuan di kelompok. Melalui pertemuan di kelompok, responden dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha mereka dengan bertukar pikiran, saran dan pendapat sesama anggota kelompok. Sub indikator kebiasaan menabung juga mengalami peningkatan sebesar 48,2% peningkatan yang terjadi disebabkan setelah masuk menjadi anggota UEK-SP dan mendapat bantuan modal, pendapatan responden meningkat sehingga sebagian pendapatan tersebut ditabung oleh responden. Sub indikator sumber informasi dan pengetahuan juga meningkat sebesar 23,25%, sub indikator aktivitas responden di kelompok meningkat sebesar 8,6%, sub indikator pendidikan meningkat sebesar 15,8%, sub indikator orientasi usaha meningkat sebesar 18,9%.

Tabel. 2. Peningkatan *Mindset* Responden Kelurahan Umbansari

No	<i>Mindset</i> (X)	Bobot (%)	Skor		Skor berbobot		Peningkatan (%)	Peningkatan (%)
			Sebe-	Sesu-	Sebe-	Sesu-		
			Lum	Dah	Lum	Dah		
1	Aktivitas Responden di kelompok	5	5,07	6,79	25,23	33,95	8,6	34
2	sumber Informasi Pengetahuan	15	4,95	6,47	74,25	97,5	23,25	31,3
3	Kebiasaan Menabung	20	4,47	6,88	89,4	137,6	48,2	53,9
4	Kepercayaan Diri	20	3,75	6,43	75	128,6	53,6	71,4
5	Pendidikan	20	7,95	8,74	159	174,8	15,8	9,9
6	Aktivitas Anggota Keluarga Wanita	15	3,73	4,18	55,95	62,7	6,75	12
7	Orientasi Usaha	5	6,05	9,83	30,25	49,15	18,9	62,4
Jumlah		100	35,97	49,32	509,2	684,3	171,5	33,6
Jumlah Terbobot					5,09	6,84	1,75	

Sumber: Data Olahan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Umbansari setelah masuk menjadi anggota UEK-SP Umbansari selama 5 tahun, dengan penambahan *mindset* sebesar 1,75 dan pertambahan rata-rata sebesar 0,35 pertahun, dimana pada tahun pertama masuk menjadi anggota UEK-SP Umbansari *mindset* responden Kelurahan Umbansari telah berada pada titik 5,09 atau titik dimana *mindset* berada di atas titik sedang yaitu setelah memasuki tahun ke-5. Ini menunjukkan bahwa *mindset* responden yang menerima dana bantuan pinjaman modal dari UEK-SP Umbansari masuk dalam kategori baik, karena telah berada pada kuadran I.

Peningkatan Rata-Rata Livelihood

Pertumbuhan kesejahteraan responden Kelurahan Umbansari dengan pertambahan *livelihood* sebesar 0,51 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,10. Masyarakat Kelurahan Umbansari berada pada titik 5,03 dimana *livelihood* responden telah berada di titik sedang sebelum masuk menjadi anggota UEK-SP Umbansari. Pertumbuhan *livelihood* dapat dilihat pada tabel 3 berikut di bawah ini.

Tabel.3. Peningkatan *Livelihood* Responden Kelurahan Umbansari

No	<i>Livelihood</i> (Y)	Bobot (%)	Skor		Skor berbobot		Peningkatan	Perubahan (%)
			Sebe-	Sesu-	Sebe-	Sesu-		
			Lum	Dah	Lum	Dah		
1	Pendapatan	35	5,76	6,37	201,6	222,95	24,15	11,9
2	Kesempatan Kerja	25	2,53	3,11	63,25	77,75	14,5	22,9
3	Konsumsi Pangan	30	5,30	5,70	159	171	12	7,5
4	Sanitasi dan Kebersihan	10	7,95	8,27	79,50	82,7	5,8	7,2
Jumlah		100	21,54	23,45	503,35	554,4	56,45	49,5
Jumlah Terbobot					5,03	5,54	0,51	

Sumber: Data Olahan

Pertumbuhan sub indikator *livelyhood* terbesar dari tabel terlihat pada pendapatan rumah tangga masyarakat Kelurahan Umbansari yang naik sebesar 24,15%, sebelum masuk menjadi anggota UEK-SP Umbansari pendapatan perkapita sebesar Rp 515.466,93,- dengan garis kemiskinan Rp 175.116,- atau sebesar 294,35% di atas garis kemiskinan, hal ini menunjukkan pada saat itu responden telah mampu mencukupi kebutuhan hidup dengan baik. Sedangkan setelah masuk menjadi anggota UEK-SP Umbansari pendapatan perkapita menjadi Rp 669.142,26,- dengan garis kemiskinan Rp 326.670,- atau sebesar 204,83% di atas garis kemiskinan, hal ini menunjukkan responden telah mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan baik. Sumber pendapatan

masyarakat Kelurahan Umbansari sebagian besar berasal dari perdagangan dan perniagaan. Sub indikator kesempatan kerja juga naik sebesar 14,5%, sub indikator konsumsi pangan mengalami peningkatan 12%, sub indikator konsumsi pangan mengalami peningkatan 5,8%.

Peningkatan Rata-rata Vektor

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan *Vector Project Analysis* (VPA) didapatkan data seperti pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Tabel Peningkatan Kesejahteraan Responden

Deskripsi	<i>Mindset</i> (X)	<i>Livelihood</i> (Y)
Sebelum	5,09	5,03
Sesudah	6,84	5,54
Peningkatan	1,75	0,51

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan responden Kelurahan Umbansari sebelum dan sesudah masuk menjadi anggota UEK-SP berdasarkan pola pikir (*mindset*) dan ekonomi (*Livelihood*). dimana pola pikir responden Kelurahan Umbansari sebelum masuk menjadi anggota UEK-SP berada pada angka 5,09 sedangkan setelah masuk menjadi anggota UEK-SP menunjukkan angka 6,84 sehingga dapat terlihat pertambahan pola pikir dengan pertambahan vektor sebesar 1,75. Adapun ekonomi (*livelihood*) responden Kelurahan Umbansari sebelum masuk menjadi anggota UEK-SP menunjukkan angka 5,03 sedangkan setelah masuk menjadi anggota UEK-SP sebesar 5,54 maka terjadi pertambahan ekonomi sebesar 0,51.

Dalam menghitung besaran nilai vektor kesejahteraan masyarakat Kelurahan Umbansari digunakan rumus segitiga Phytagoras yaitu $C^2 = A^2 + B^2$ dimana C adalah besaran nilai vektor, A adalah panjang garis *mindset* dengan nilai 1,75 dan B adalah panjang garis *livelihood* dengan nilai 0,51 dari rumus segitiga phytagoras tersebut di peroleh besaran nilai vektor 1,82 dengan pertambahan rata-rata 0,36 pertahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut:

$$C^2 = A^2 + B^2$$

$$C^2 = 1,75^2 + 0,51^2$$

$$C^2 = 3,06 + 0,26$$

$$C^2 = 3,32$$

$$C = \sqrt{3,32}$$

$$C = 1,82$$

Untuk menghitung rata-rata vektor pertahun:

$$PT = \frac{PG}{THN}$$

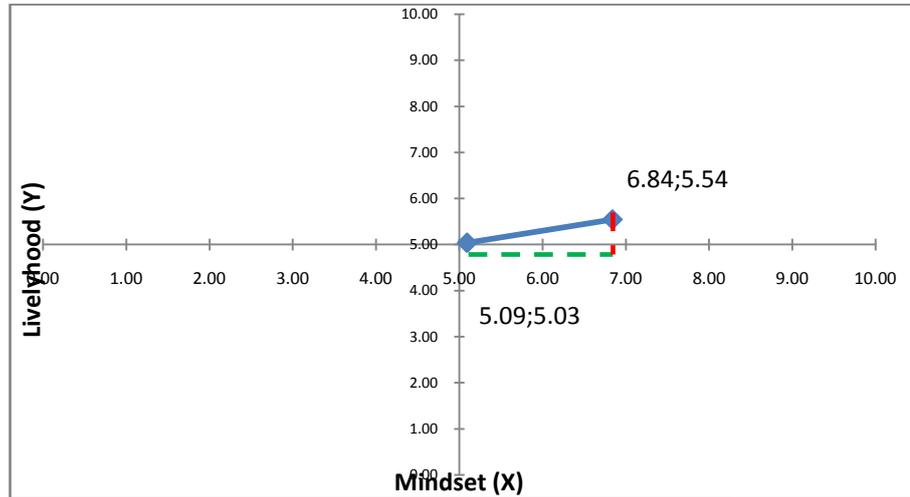
$$PT = \frac{1,82}{5}$$

$$PT = 0,36$$

Dimana:

- C = Pertambahan rata-rata Vektor
- A = Panjang garis *Mindset*
- B = Panjang garis *Livelihood*
- PT = Peningkatan pertahun
- PG = Panjang garis vektor

Untuk lebih jelasnya melihat vektor pertambahan kesejahteraan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Gambar 1. Peningkatan Mindset dan Livelihood Dengan VPA Masyarakat DI Kelurahan Umbansari

Keterangan :

- = panjang garis miring (VPA)
- - - = garis pola pikir (*Mindset*)
- - - = garis ekonomi (*livelihood*)

Pola Pengembangan Usaha

Dalam pengembangan usaha, masyarakat yang sudah masuk menjadi anggota UEK-SP Umbansari secara bertahap mengajukan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar dari saat pertama mengajukan pinjaman. Besaran pinjaman yang terus meningkat dengan harapan usaha masyarakat yang semakin berkembang.

Berdasarkan Tabel 5 di bawah dapat dilihat bahwa sebanyak 14,03% responden melakukan pengembangan jenis usaha baru, dengan kata lain responden memiliki dua jenis usaha yang berbeda yang dimana salah satu usaha baru tersebut dibangun dari bantuan pinjaman modal yang berasal dari UEK-SP Umbansari. Jenis usaha lama yang ditekuni oleh responden yaitu peternakan, pertanian, usaha dagang, jasa dan perkebunan dan setelah mendapat dana bantuan dari UEK-SP Umbansari reponden mengembangkan usahanya di bidang lain dari sebelumnya ke bidang lain yaitu dagang, jasa dan ternak unggas. Sedangkan 85,97% responden menggunakan bantuan pinjaman modal untuk pengembangan usaha lama yang mereka miliki.

Tabel 5. Tabel UEK-SP Pola Pengembangan Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden		Penambahan Usaha Baru
	Tahun 2005	Tahun 2010	
Perdagangan	31	36	5
Pertanian	4	4	-
Peternakan	3	4	1
Perikanan	4	4	-
Perkebunan	2	2	-
Industri Kecil	3	3	-
Jasa	10	12	2
Jumlah	57	65	8

Sumber: Data Olahan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan pemanfaat dana program UEK-SP Kelurahan Umbansari berdasarkan indikator pola pikir (*Mindset*) dan kualitas hidup (*Livelihood*) mengalami peningkatan, terlihat dari kegiatan usaha pemanfaat yang berkembang dan pemanfaat melakukan kegiatan usaha di bidang lain.
2. Indikator kesejahteraan pola pikir (*Mindset*) responden anggota UEK-SP Kelurahan Umbansari sebelum menjadi anggota UEK-SP berada di kuadran I yang terkategori baik dengan posisi pola pikir diatas titik sedang dan setelah masuk menjadi anggota UEK-SP terjadi peningkatan mindset.
3. Indikator kualitas hidup (*Livelihood*) pemanfaat dana UEK-SP Kelurahan Umbansari sebelum masuk menjadi anggota UEK-SP berada pada kuadran I dengan posisi kualitas hidup sedikit diatas titik sedang dan setelah masuk menjadi anggota UEK-SP tetap berada kuadran I yang terkategori baik dengan pergerakan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Saran

Kesejahteraan pemanfaat dana pinjaman dari UEK-SP Kelurahan Umbansari sudah cukup baik, perekonomian pemanfaat meningkat dengan adanya program UEK-SP dan yang perlu menjadi perhatian adalah menjangkau masyarakat kecil dan menengah yang belum tergabung dalam program UEK-SP, sehingga secara keseluruhan masyarakat bisa merasakan dampak keberadaan UEK-SP. Program pendukung di UEK-SP perlu digalakkan seperti mengadakan penyuluhan yang semakin intensif dan seminar bagi masyarakat yang menjadi

anggota dan pengelola UEK-SP. UEK-SP Umbansari harus melakukan pembinaan kepada masyarakat yang menjadi anggota untuk kemajuan bersama baik masyarakat maupun UEK-SP itu sendiri.

Besaran bantuan pinjaman modal yang diberikan oleh UEK-SP juga perlu menjadi fokus perhatian, dimana responden kadang terkendala dengan batasan bantuan kredit dimana berbanding terbalik dengan kebutuhan dana yang diperlukan responden untuk pengembangan usaha jauh lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau. 2006. **Panduan Administrasi Keuangan Bagi Pengelola UED-SP.** Pemerintah Provinsi Riau. Pekanbaru.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekanbaru. 2008.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2009. **Riau Dalam Angka 2009.** BPS Provinsi Riau. Pekanbaru.

Hill, Hall. 2002. **Ekonomi Indonesia.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta